



### Konstruksi Identitas Diplomatik Indonesia dalam Pertemuan Virtual Pemimpin BRICS

#### *Constructing Indonesia's Diplomatic Identity in the BRICS Virtual Leaders Meeting*

Ina Primasari<sup>1</sup>, Zamroatul Fuaddah<sup>2</sup>, Aryo Prakoso Wibowo<sup>2</sup>, Syurya Muhammad Nur<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Vokasi, Sebelas Maret University, Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Sebelas Maret University, Surakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Merdeka Malang, Malang, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

inaprimasari@staff.uns.ac.id, zamroatulfuaddah@gmail.com,

aryo.prakoso@unmer.ac.id, syurya.muhammadnur@esaunggul.ac.id

#### Abstrak

BRICS mewakili kekuatan global alternatif yang menantang dominasi Negara Barat dengan menekankan multipolaritas, yaitu kerja sama antar negara-negara besar untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih seimbang dan tidak hanya dikendalikan oleh kekuatan Barat. Studi ini menganalisis partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam Pertemuan Virtual Pemimpin BRICS pada 8 September 2025, dengan fokus pada bagaimana identitas diplomatik Indonesia dibangun melalui pidato kenegaraan resmi. Menggunakan Analisis Wacana Kritis (CDA) Fairclough dan perspektif konstruktivis dalam Hubungan Internasional (Wendt, 1992), penelitian ini mengkaji dimensi tekstual, diskursif, dan sosial dari pidato tersebut. Pada tingkat tekstual, temuan menyoroti citra Indonesia sebagai mitra kerja sama sekaligus menyuarakan kritik implisit terhadap hegemoni global. Pada tingkat diskursif, pidato tersebut diproduksi oleh Sekretariat Presiden dan disebarluaskan melalui media nasional dan internasional, sehingga memperkuat citra diplomatik Indonesia di hadapan khalayak global dan domestik. Pada tingkat praktik sosial, wacana tersebut mencerminkan dukungan terhadap multipolaritas, penolakan terhadap standar ganda, dan solidaritas internasional. Studi ini menunjukkan bahwa bahkan pernyataan multilateral singkat oleh Presiden Prabowo Subianto dapat berfungsi sebagai instrumen penting untuk pembangunan identitas dan kekuatan lunak Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan memperluas penerapan CDA ke ranah diplomasi internasional.

**Kata kunci:** BRICS; Critical Discourse Analysis; Diplomacy; Hubungan Internasional

#### Abstract

*BRICS represents an alternative global power that challenges Western dominance by emphasizing multipolarity, namely cooperation among major states to create a more balanced world order that is not solely controlled by Western powers. This study analyzes President Prabowo Subianto's participation in the BRICS Leaders Virtual Meeting on 8 September 2025, focusing on how Indonesia's diplomatic identity is constructed through an official state address. Using Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) and the constructivist perspective in International Relations (Wendt, 1992), the research examines the textual, discursive, and social dimensions of the speech. At the textual level, the findings highlight Indonesia's image as a cooperative partner while simultaneously voicing implicit critiques of global hegemony. At the discursive level, the speech was produced by the Presidential Secretariat and disseminated*

*through national and international media, thereby reinforcing Indonesia's diplomatic image before both global and domestic audiences. At the social practice level, the discourse reflects support for multipolarity, resistance to double standards, and international solidarity. The study demonstrates that even a short multilateral statement by President Prabowo Subianto can serve as an important instrument for the construction of Indonesia's identity and soft power. This research contributes novelty by extending the application of CDA to the sphere of international diplomacy.*

**Keywords:** BRICS; Critical Discourse Analysis; Diplomacy; International Relation

## I. PENDAHULUAN

BRICS adalah platform kerja sama global untuk tata kelola, pembangunan ekonomi, dan multipolaritas yang dikembangkan oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. BRICS berfungsi sebagai platform utama untuk representasi negara-negara berkembang, menantang hegemoni Barat melalui agenda reformasi lembaga keuangan internasional dan pembangunan alternatif (Dwyer & Arifon, 2019; Mielniczuk, 2013; O'Neill, 2001). Pembentukan BRICS melambangkan kolaborasi lintas kawasan dan sinergi kekuatan negara-negara berkembang. Kerja sama BRICS menunjukkan bahwa beberapa negara berkembang sedang membangun tatanan ekonomi yang lebih inklusif dan adil. Berbagai isu strategis dan berkelanjutan dibahas, sehingga semakin relevan bagi negara-negara berkembang saat ini. Indonesia bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025, dan hal ini telah memberikan dampak positif, memungkinkan Indonesia untuk berperan aktif dan terlibat dalam forum pengambilan keputusan global, menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan negara-negara berkembang lainnya (Putra et al., 2025; Romero-Ávila, 2025). Partisipasi Indonesia berpotensi memperluas akses ke sumber pendanaan non-konvensional sekaligus memperkuat diplomasi ekonomi internasional. Kemitraan dengan negara-negara berkembang lainnya, Indonesia dapat menegosiasikan kepentingannya secara lebih adil di tengah perubahan tatanan ekonomi global (Heriamsal, 2025).

Keterlibatan Indonesia tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga simbolis, mencerminkan aspirasinya untuk menjadi bagian dari forum internasional multipolar (Sakinah et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin proaktif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang dalam pembangunan ekonomi nasional. Konteks ekonomi global, beberapa studi memprediksi bahwa negara-negara BRICS, bersama dengan negara-negara pasar berkembang seperti Indonesia, akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB global dalam beberapa dekade mendatang (Armijo & Roberts, 2014; Iqbal, 2022; Radulescu et al., 2014). Pergeseran yang sedang berlangsung menuju tatanan dunia multipolar ini ditandai dengan meningkatnya pengaruh ekonomi negara-negara berkembang, yang semakin menantang dominasi kekuatan Barat tradisional (Armijo & Roberts, 2014). Selain memperkuat kedudukan internasional Indonesia, potensi Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dapat dipahami mengingat kekuatannya yang semakin meningkat di antara negara-negara non-Barat. Partisipasi Indonesia dalam BRICS akan

meningkatkan posisinya dan memberikan peluang untuk memajukan kepentingan negara-negara berkembang. Hal ini akan memperkuat kemandirian ekonominya di tingkat nasional dan memperluas peluang pembiayaan untuk berbagai strategi proyek. Lebih lanjut, lanskap geopolitik saat ini sedang mengalami transformasi, ditandai dengan meningkatnya persaingan antar kekuatan besar, yang mengakibatkan munculnya isu-isu internasional. Keanggotaan potensial Indonesia dalam BRICS dapat mengimbangi pengaruh Barat, memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membentuk norma-norma tata kelola global (Öniş & Kutlay, 2017).

Pergeseran menuju tatanan multipolar mendorong Indonesia untuk mereposisi identitas diplomatiknya di tengah meningkatnya persaingan kekuatan global. Melalui lanskap politik global yang semakin kompleks yang dibentuk oleh persaingan kekuatan besar, Indonesia berperan sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang, serta antara Timur dan Barat (Beeson & Crawford, 2022). Transformasi kepemimpinan nasional setelah pemilihan umum 2024 telah menunjukkan pergeseran menuju diplomasi yang lebih proaktif dan otonom secara strategis, di mana kebijakan luar negeri tidak hanya reaktif terhadap situasi global tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan pengaruh dan kredibilitas Indonesia secara internasional (Dharmaputra, 2025). Partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam KTT Pemimpin Virtual BRICS pada 8 September 2025 merupakan momen penting yang menandai arah diplomasi baru Indonesia, menegaskan kembali posisinya sebagai kekuatan menengah yang berupaya memperkuat solidaritas dengan negara-negara di belahan selatan global sambil mempertahankan keseimbangan strategis dengan kekuatan besar lainnya. Meskipun Indonesia telah aktif terlibat dalam inisiatif yang mendorong kerja sama antar negara, khususnya di bidang perdagangan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas, bergabung dengan BRICS akan semakin memperkuat komitmennya terhadap kerja sama multilateral dan meningkatkan reputasi internasionalnya.

Partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam forum BRICS mencerminkan pergeseran strategis dalam kedudukan internasional Indonesia. Melalui presentasi singkatnya, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip multipolaritas, kerja sama ekonomi, dan upaya untuk mewujudkan sistem internasional yang lebih adil dan setara. Keterlibatan ini menandai penguatan dimensi kepemimpinan Prabowo Subianto dan menunjukkan kemampuan Indonesia dalam politik internasional. Dalam kerangka doktrin kebijakan luar negeri Indonesia, yang telah lama menjadi negara "non-blok", beliau menunjukkan niat Indonesia untuk memperluas strategi kerja samanya tanpa mengorbankan otonominya dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Indonesia, sebagai negara "non-blok", bebas dan tidak berpihak, serta memiliki kemampuan untuk menentukan arah kebijakan berdasarkan kepentingan nasional dan internasional. Pidato ini juga berfungsi sebagai latihan kekuatan lunak, yang menunjukkan kemampuan Indonesia untuk membentuk persepsi internasional melalui narasi intelijen yang inklusif dan

kolaboratif yang berlandaskan cita-cita keadilan global (Laksmana, 2025). Dengan demikian, peristiwa ini merupakan bentuk komunikasi politik sekaligus strategi wawasan yang digunakan Indonesia untuk membangun identitasnya sebagai aktor yang rasional, kooperatif, dan independen di tengah persaingan kekuatan global.

Studi ini secara kritis menganalisis pidato Presiden Prabowo Subianto pada KTT Virtual Pemimpin BRICS, yang berfungsi sebagai instrumen untuk membangun diplomasi Indonesia, yang pada gilirannya berfungsi sebagai instrumen untuk membangun citra diplomatik Indonesia di panggung internasional. Penelitian tentang pidato kenegaraan dalam diplomasi multilateral masih terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) untuk mengeksplorasi hubungan antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan (Fairclough, 1992, 2013; Van Dijk, 2008; Wodak & Meyer, 2009). Sebagian besar studi tentang wacana politik di Indonesia masih berfokus pada isu-isu domestik, seperti retorika populis, komunikasi elektoral, atau pemingkungan media.

Studi ini berupaya mengisi kesenjangan ilmiah ini dengan mengintegrasikan Analisis Wacana Kritis dengan Teori Hubungan Internasional Konstruktivis (Wendt, 1999), untuk meneliti bagaimana pidato diplomatik berfungsi sebagai arena pembentukan identitas negara dan instrumen legitimasi kebijakan luar negeri di tengah dinamika multipolar global. Melalui pilihan bahasa dan narasi kerja sama internasional yang spesifik, pidato tersebut membingkai identitas Indonesia sebagai aktor rasional yang berjuang untuk keadilan dan solidaritas, sambil mempertahankan keseimbangan strategis dengan kekuatan-kekuatan besar dunia. Dengan demikian, pidato tersebut menjadi arena diskursif yang mencerminkan negosiasi antara kepentingan nasional, ideologi kebijakan luar negeri, dan konstruksi citra diplomatik Indonesia di tingkat internasional. Berdasarkan pemahaman ini, studi ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian utama: Bagaimana wacana Presiden Prabowo Subianto pada KTT Pemimpin Virtual BRICS membangun identitas diplomatik Indonesia dalam konteks multipolaritas global?

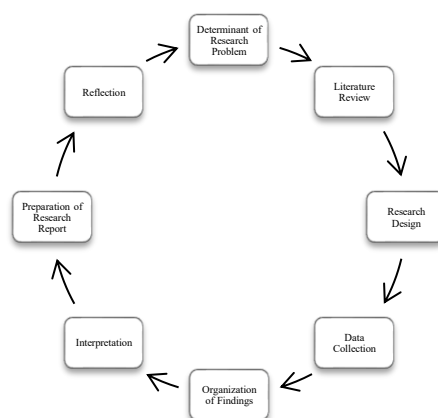
## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough (1992) untuk menganalisis konstruksi identitas diplomatik Indonesia dalam pidato Presiden Subianto pada Pertemuan Virtual Pemimpin BRICS tanggal 8 September 2025. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis wacana tidak hanya dalam hal struktur linguistik tetapi juga dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas yang membentuknya (Badara, 2012). Berdasarkan perspektif ini, penelitian ini menerapkan kerangka Analisis Wacana Kritis Fairclough (1992), untuk memeriksa lapisan wacana. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti dalam memahami makna, ideologi, relasi kekuasaan dan representasi identitas yang terkandung dalam bahasa politik secara mendalam. Diplomasi internasional menggunakan bahasa

tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai instrumen politik untuk membangun legitimasi dan posisi strategis dalam tatanan global.

Objek penelitian ini adalah pernyataan diplomatik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Pertemuan Virtual Pemimpin BRICS yang berdurasi 3 menit 44 detik yang dipublikasikan melalui kanal resmi Sekretariat Presiden Republik Indonesia dan berberapa media daring nasional. Pidato tersebut dipilih karena merepresentasikan posisi diplomatik strategis yang mewakili posisi Indonesia dalam tatanan global. Format pertemuan virtual menjadi penting untuk dianalisis karena komunikasi diplomatik virtual berfungsi sebagai media penyampaian pesan antarnegara. Forum virtual memperluas audiens diplomatik, sehingga pidato kepala negara tidak hanya ditujukan kepada elite nasional, juga kepada publik global.

Data penelitian berupa video yang kemudian di transkripsikan, diverifikasi dan diklasifikasikan bersamaan tema-tema diskursif utama. Unit analisis penelitian difokuskan pada kalimat, frasa dan pilihan diksi dalam pernyataan diplomatik Prabowo Subianto. Analisis data dilakukan menggunakan mode tiga dimensi Fairclough meliputi analisis tekstual, praktik diskursif dan praktik sosial. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu identifikasi data, transkripsi, *open coding*, kategorisasi tema dan interpretasi relasi kekuasaan identitas dan identitas diplomatik. Teknik coding yang dilakukan oleh peneliti menemukan pola representasi identitas Indonesia dalam pidato diplomatik tersebut. Setelah proses coding dan analisis peneliti menyajikan data dan menarik kesimpulan dengan mengintegrasikan pendekatan perspektif konstruktivisme dalam konteks hubungan internasional oleh (Wendt, 1992). Data dikumpulkan dan dianalisis melalui proses bagan alur sistematis seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1, yang mencakup tahapan transkripsi data, pengkodean, kategorisasi wacana, dan analisis interpretatif dalam kerangka tiga dimensi Analisis Wacana Kritis.



Gambar 1. Bagan alur penelitian  
Sumber : (Peneliti, 2026)

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan dan diskusi dari penelitian ini. Analisis ini didasarkan pada model Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough (2013), yang berfokus pada hubungan timbal balik antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam konteks sosial. Pendekatan ini menempatkan bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi sebagai bentuk praktik sosial yang secara aktif membentuk realitas sosial.

Kerangka analitis terdiri dari tiga dimensi yang saling terkait: dimensi tekstual, dimensi praktik diskursif, dan dimensi praktik sosiokultural. Dimensi-dimensi ini saling berhubungan dan bersama-sama membentuk dasar untuk pemeriksaan kritis terhadap fenomena sosial. Bagian-bagian berikut menguraikan bagaimana model tiga dimensi Fairclough (2013) diterapkan untuk menganalisis pernyataan diplomatik Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan selama Pertemuan Virtual Pemimpin BRICS.

#### 1. Dimensi Tekstual

Pada tingkat tekstual, pidato Presiden Prabowo Subianto menggunakan berbagai fitur linguistik yang memperkuat pesan politik dan ideologis yang disampaikan. Analisis ini berfokus pada pilihan leksikal, metafora, dan strategi retorika yang berfungsi sebagai penanda ideologi dan konstruksi makna (Mufidah et al., 2025). Unsur-unsur linguistik utama diuraikan di bawah ini:

|                                            |                                                                                                                                         |                      |   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| Penggunaan metafora dan simbolisme positif | <i>"Indonesia considers BRICS to be a very strong pillar of stability and hope in the current international geopolitical situation"</i> | 00:00:27<br>00:00:37 | - |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|

Pidato ini menggunakan metafora dan simbolisme positif yang menggambarkan BRICS sebagai pilar kekuatan moral dan simbol harapan global. Pilihan frasa tersebut menciptakan citra positif yang memposisikan BRICS sebagai pendukung stabilitas di tengah gejolak global. Secara ideologis, metafora ini menekankan komitmen Indonesia terhadap tatanan dunia yang seimbang dan adil.

|                                           |                                                                                                                                 |                      |   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| Penggunaan diksi yang kontras dan negatif | <i>"We now experience a world full of instability and also a world that the concept of multilateralism is being challenged"</i> | 00:00:39<br>00:00:55 | - |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|

Penggunaan kata-kata "instability" dan "is being challenged" menciptakan kontras semantik antara dunia yang tidak stabil saat ini dan praktik multilateralisme yang semakin menurun. Struktur linguistik ini berfungsi sebagai kritik terhadap ketidaksetaraan global sekaligus memperkuat posisi Indonesia



sebagai negara yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan dalam hubungan internasional.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| Penggunaan statistik dan kuantifikasi | <i>"BRICS now is more than 55% of world population. We are more than 40% of global GDP. BRICS has the biggest economies, biggest countries in population, biggest markets, countries with large natural resources, critical resources"</i> | 00:01:16<br>00:01:45 | - |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|

Penggunaan data numerik memberikan legitimasi pada kekuatan BRICS. Hal ini memperkuat argumen bahwa BRICS memiliki fondasi material dalam sistem internasional, bukan sekadar aliansi ideologis. Penggunaan referensi statistik menandakan rasionalitas dan kredibilitas Indonesia. Selain itu, penggunaan diksi superlatif seperti "biggest countries" menyoroti kekuatan BRICS sebagai aktor global utama dengan sumber daya strategis. Narasi tersebut membangun kekuatan dan menempatkan Indonesia pada posisi yang setara dengan kekuatan besar lainnya sambil tetap mempertahankan identitas independennya.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                      |   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| Penggunaan pengulangan dan modalitas imperatif | <i>"Indeed, we must continue and work closer together. We must consult each other more. We must uphold openness. We must continue this close coordination and cooperation in this present world of uncertainty"</i> | 00:01:59<br>00:02:36 | - |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|

Pengulangan frasa "we must" sebanyak empat kali menandai penekanan pada komitmen dan urgensi kerja sama. Pengulangan ini membangkitkan solidaritas di antara negara-negara anggota BRICS dan menunjukkan posisi Indonesia sebagai peserta aktif dalam menjaga keterbukaan dan kolaborasi. Frasa-frasa yang digunakan Prabowo membangun citra Indonesia sebagai kekuatan menengah yang mempromosikan diplomasi kolaboratif di tengah ketidakpastian global.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                      |   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| Penggunaan metafora ideologis dan kritik moral | <i>"We live in a world of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened,</i> | 00:02:33<br>00:03:12 | - |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|

|  |                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------|
|  | <i>bullied, and where trade and finance become weapon</i> |
|--|-----------------------------------------------------------|

Pernyataan ini menyajikan serangkaian metafora ideologis dan kritik moral. Pengulangan “where...” menekankan ketidakstabilan sistem internasional saat ini. Penggunaan frasa “might makes right” menandakan kritik eksplisit terhadap hegemoni global yang mengabaikan hukum internasional, sementara “trade and finance become weapon” menggambarkan bentuk-bentuk baru kekuatan ekonomi. Secara ideologis, Indonesia dibangun sebagai negara yang berpihak pada keadilan sekaligus memperkuat nilai-nilai solidaritas di antara negara-negara Global Selatan.

|                                                         |                                                                                                                                                                         |                      |   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| <i>Use of commitment modality and cooperative image</i> | <i>“We fully support the initiatives taken. We commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries”</i> | 00:03:17<br>00:03:32 | - |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|

Pernyataan ini menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai mitra yang kooperatif dan konstruktif. Penggunaan kata-kata “committed” dan “fully support” mengungkapkan ketulusan diplomatik dalam membangun kemitraan. Struktur kalimat yang formal dan afirmatif membangun citra Indonesia sebagai negara yang tidak hanya mendukung tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam memperkuat solidaritas global. Dimensi tekstual menunjukkan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto menggunakan bahasa secara strategis untuk membangun identitas Indonesia sebagai kekuatan menengah yang rasional, kooperatif, dan berlandaskan moral. Melalui pemilihan diksi, pengulangan, dan metafora ideologis yang cermat, pidato tersebut mengartikulasikan visi Indonesia tentang tatanan global yang adil, seimbang, dan inklusif, yang mencerminkan tujuan yang lebih luas dari diplomasi Global Selatan.

## 2. Dimensi Praktik Wacana

Pada tingkat praktik diskursif, analisis berfokus pada bagaimana pernyataan diplomatik diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh berbagai audiens. Dimensi ini menekankan bahwa komunikasi diplomatik bukan hanya tindakan linguistik tetapi juga praktik institusional dan politik yang sistematis (Fairclough, 2013). Analisis ini mengeksplorasi bagaimana teks tersebut diciptakan dalam struktur institusional tertentu, disebarluaskan melalui berbagai platform media, dan diinterpretasikan oleh berbagai audiens baik di tingkat nasional maupun internasional.

### a) Produksi Teks

Pidato tersebut diproduksi oleh Sekretariat Presiden dalam format formal dan diplomatik, yang menggarisbawahi sifat institusional komunikasi negara.



Disampaikan pada Pertemuan Virtual Pemimpin BRICS resmi pada 8 September 2025, pidato tersebut mencerminkan persiapan yang terstruktur dan disengaja daripada ekspresi spontan. Pilihan linguistik, struktur pidato, dan bentuk sapaan seperti "presiden terhormat" menunjukkan kepatuhan terhadap norma komunikasi multilateral. Mediasi institusional ini memastikan bahwa pidato tersebut mewakili suara resmi negara Indonesia. Wacana politik dalam konteks negara tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan kebijakan tetapi juga untuk memproyeksikan otoritas dan legitimasi dalam arena internasional (Gronau & Schmidtke, 2016; Steffek, 2003).

#### a) Distribusi Teks

Distribusi pidato tersebut terjadi melalui dua saluran utama: forum virtual BRICS itu sendiri, yang secara langsung menargetkan audiens diplomatik internasional, dan penyebaran selanjutnya melalui media nasional dan internasional. Reproduksi oleh media seperti Kantor Berita Xinhua dan Kompas memperluas visibilitas dan resonansi pesan diplomatik Prabowo Subianto di luar peserta langsung pertemuan tersebut. Penyebaran dua saluran ini memperkuat citra Indonesia sebagai mitra kerja sama dalam tata kelola global. Komunikasi internasional berfungsi sebagai instrumen kunci dalam membentuk citra eksternal suatu negara dan memperkuat identitasnya dalam ruang wacana global (Hui et al., 2026; McEntee-Atalianis, 2011).

#### b) Konsumsi Teks

Pidato tersebut dikonsumsi oleh audiens di tingkat nasional dan internasional sebagai bentuk legitimasi diplomatik dari sikap kebijakan luar negeri Indonesia. Di tingkat internasional, audiens utama terdiri dari para pemimpin dan negara anggota BRICS yang menafsirkan wacana Indonesia sebagai ekspresi solidaritas Global Selatan dan dukungan terhadap multipolaritas. Di tingkat domestik, audiens terdiri dari warga negara Indonesia yang mengakses pidato tersebut melalui liputan media nasional. Penyebaran wacana ini di dalam negeri berfungsi untuk menegaskan legitimasi orientasi kebijakan luar negeri Presiden Prabowo dan untuk menumbuhkan dukungan publik terhadap peningkatan keterlibatan Indonesia dalam kerangka kerja multilateral global.

#### **b) Dimensi Praktik Sosial dan Budaya**

Pada dimensi sosiokultural, studi ini menganalisis fungsi pernyataan diplomatik dalam konteks sosial yang lebih luas, dengan mempertimbangkan relasi kekuasaan dan ideologi yang ada serta lingkungan sosial-politik tempat pernyataan tersebut dihasilkan. Tingkat ini berfokus pada bagaimana wacana beroperasi sebagai bagian dari sistem makna yang lebih luas yang mencerminkan identitas politik, pendirian moral, dan posisi Indonesia dalam tatanan internasional.

|                         |                                                                                             |                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Legitimasi<br>Kekuasaan | <i>"BRICS now is more than 55% of world population. We are more than 40% of global GDP"</i> | 00:01:16-<br>00:01:26 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

Pidato ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi dominasi populasi dan ekonomi BRICS di tengah pergeseran ekonomi global menuju Selatan. Penekanan pada statistik global menyoroti bahwa kekuatan ekonomi tidak lagi dimonopoli oleh Barat. Dari perspektif sosio-kultural, bahasa ini mewakili kebutuhan politik global akan legitimasi dan pembentukan tatanan multipolar yang memungkinkan negara-negara berkembang untuk diakui secara internasional (Beeson & Crawford, 2022; Wendt, 1999).

|                    |                                                                                                                                          |                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Solidaritas Global | <i>"We live in a world of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right"</i> | 00:02:33-<br>00:02:54 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

Prabowo membangun citra Indonesia sebagai bagian dari Global South yang menolak dominasi Barat dan mendukung tatanan dunia yang adil dan merata. Semangat perlawanan yang diungkapkan dalam pernyataan ini menempatkan solidaritas sebagai bentuk simbol kekuatan bagi negara-negara berkembang. Dari sudut pandang sosio-kultural, hal ini mencerminkan keselarasan Indonesia dengan negara-negara Selatan yang memiliki pengalaman sejarah marginalisasi yang sama dan berupaya mencapai kesetaraan dalam tata kelola global (Laksmiana, 2025; Wendt, 1999).

|                                          |                                                                                       |                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kemerdekaan<br>dan Identitas<br>Kekuatan | <i>"Indeed, we must continue and work closer together... we must uphold openness"</i> | 00:01:59-<br>00:02:28 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

Penggunaan berulang frasa "we must" membangun identitas Indonesia sebagai kekuatan menengah, sebuah negara yang menjembatani kepentingan Barat dan Selatan, sekaligus mempromosikan keterbukaan dan kolaborasi. Secara sosial, hal ini sejalan dengan doktrin kebijakan luar negeri Indonesia yang independen dan aktif sejak lama, yang menekankan otonomi strategis dan keseimbangan dalam urusan internasional. Wacana ini mencerminkan upaya Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sambil terlibat secara konstruktif dengan berbagai blok global, menunjukkan bahwa kekuatan menengah dapat memainkan peran mediasi dan stabilisasi dalam hubungan multipolar.

|                         |                                                                                      |                      |   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| Moralitas<br>dan Empati | <i>"Little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied"</i> | 00:02:56<br>00:03:06 | – |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|

Orientasi moral dan empati Indonesia terhadap negara-negara kecil yang menjadi korban tekanan global menunjukkan etos kepemimpinan etis, di mana kekuasaan

dijalankan untuk melindungi daripada mendominasi. Berdasarkan perspektif sosiokultural, wacana ini memperkuat identitas kekuatan lunak Indonesia, yang dibangun di atas nilai-nilai moral, keadilan, dan solidaritas Selatan. Dengan menyuarakan keprihatinan terhadap negara-negara yang lebih lemah, pernyataan Prabowo memproyeksikan Indonesia sebagai aktor yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang di panggung dunia, mencerminkan penggunaan persuasi moral sebagai sumber daya diplomatik (Wendt, 1999).

### c) Strategi Diskursif dalam Pidato Diplomatik

Pidato diplomatik berfungsi sebagai bentuk komunikasi politik yang bertujuan untuk memperkuat posisi ideologis dan membangun citra atau identitas internasional suatu negara. Menurut (Fairclough, 2013), strategi diskursif beroperasi untuk menegosiasikan kekuasaan melalui penggunaan pilihan linguistik, struktur kalimat, dan ekspresi simbolik secara sengaja. Diplomasi, dalam pengertian ini, berfungsi sebagai media untuk mengartikulasikan kebijakan luar negeri dan sebagai wahana untuk mengekspresikan identitas nasional yang berakar pada nilai-nilai yang mendasari orientasi politik suatu negara (Roberts, 2017).

Pidato Presiden Prabowo Subianto, strategi diskursif muncul secara menonjol melalui penggunaan metafora moral. Frasa seperti *"we must uphold openness"* dan *"pillar of stability and hope"* mengungkapkan taktik retorika yang menekankan komitmen kolektif dan membangun BRICS sebagai simbol harapan untuk tatanan global yang lebih adil. Demikian pula, penggunaan ungkapan yang kontras seperti *"double and even triple standards"* merupakan strategi kritis yang menantang hegemoni global dan menempatkan Indonesia bersama negara-negara berkembang yang berupaya mencapai kesetaraan dalam hubungan internasional (Amoako Addae, 2021; Laksmana, 2025). Melalui perspektif analisis wacana kritis, representasi BRICS sebagai alternatif terhadap dominasi Barat yang membangun narasi tertentu mengenai keadilan global dan distribusi kekuasaan internasional. Menurut Beeson & Crawford (2022) praktik diskursif menunjukkan bahwa wacana diplomatik tidak pernah netral; melainkan berfungsi sebagai instrumen ideologis dan bentuk simbolis perlawanan terhadap dominasi Barat.

Strategi diskursif ini memperkuat citra diplomatik Indonesia sebagai kekuatan menengah yang kooperatif. Melalui bahasa yang inklusif dan tegas, Prabowo berupaya membangun kepercayaan timbal balik di antara anggota BRICS sekaligus memposisikan Indonesia sebagai aktor yang kredibel dan konstruktif dalam tata kelola global. Hal ini sejalan dengan pernyataan Fairclough (2013) bahwa strategi diskursif dapat mereproduksi hubungan sosial dan memperkuat legitimasi kekuasaan melalui proses naturalisasi, di mana posisi ideologis tertentu diterima sebagai akal sehat. Dengan demikian, pidato Prabowo berfungsi sebagai tindakan diplomasi yang bersifat performatif sekaligus negosiasi linguistik mengenai peran Indonesia yang berkembang dalam tatanan dunia multipolar.

#### d) Pembangunan Kekuatan Indonesia melalui Hubungan Internasional

Melalui kerangka konstruktivisme dalam hubungan internasional, kekuatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kapasitas ekonomi atau militernya, tetapi juga dibentuk melalui interaksi yang dibangun secara sosial dan wacana yang diartikulasikan (Wendt, 1999). Negara bertindak sebagai entitas sosial yang mewakili identitas dan kepentingannya melalui proses komunikatif dan simbolik. Pidato diplomatik dengan demikian menjadi media vital di mana suatu bangsa membangun citranya, memperkuat posisinya, dan menegaskan perannya dalam sistem internasional. Finnemore & Sikkink (2001) juga menekankan bahwa bahasa diplomatik memiliki kemampuan untuk membentuk norma dan persepsi internasional, yang pada akhirnya memengaruhi bagaimana suatu negara diposisikan dalam tatanan global.

Indonesia dibangun sebagai negara berdaulat kekuatan menengah, kooperatif, dan selaras dengan Global Selatan dalam dukungannya terhadap keadilan internasional. Wendt (1999) menggambarkan hal ini sebagai bagian dari konstruksi sosial identitas, di mana tindakan linguistik suatu negara mencerminkan citra dirinya dalam hubungannya dengan negara lain. Melalui ekspresi solidaritas dan kolaborasi, Indonesia menegaskan kembali identitasnya sebagai kekuatan penyeimbang dalam konfigurasi kekuasaan yang ada. Konstruksi identitas tersebut dapat dilihat sebagai strategi diplomatik untuk meningkatkan legitimasi dan pengaruh Indonesia di tengah perubahan kekuasaan. Narasi terkait *Global South* dalam pidato Prabowo secara tidak langsung memperlihatkan upaya Indonesia untuk mereposisi dirinya di antara kekuatan besar dunia.

Selain upaya untuk membangun identitas global, pidato Prabowo juga berfungsi untuk membangun kekuatan simbolis Indonesia di mata komunitas internasional. Bahasa yang digunakan dalam pernyataannya membawa dimensi performatif mengundang kolaborasi, mempromosikan keterbukaan, dan memperkuat norma-norma bersama. Dalam perspektif konstruktivis, kekuatan simbolis tersebut dipahami sebagai kekuatan ideasional, pengaruh yang muncul dari kemampuan suatu negara untuk membentuk makna (Wendt, 1999). Wacana diplomatik tidak hanya mencerminkan kekuatan ekonomi atau geopolitik tetapi juga memproyeksikan kekuatan lunak berdasarkan nilai-nilai, solidaritas, dan kepemimpinan etis (Beeson & Crawford, 2022). Wacana diplomatik berfungsi sebagai instrumen politik untuk memperluas ruang negosiasi dan pengaruh Indonesia dalam sistem Internasional.

Konstruksi kekuatan Indonesia, sebagaimana tercermin dalam pidato Prabowo di BRICS, terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan otoritas moral dengan legitimasi politik. Melalui wacana ini, Indonesia menegaskan identitasnya sebagai bangsa yang berkomitmen pada keadilan dan inklusivitas sekaligus menunjukkan penggunaan bahasa secara performatif sebagai alat diplomasi. Sejalan dengan pandangan Wendt (1999), identitas tetap dinamis,

dibentuk melalui negosiasi berkelanjutan dan komunikasi diplomatik seperti pidato kenegaraan dan partisipasi dalam forum internasional.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan temuan, studi ini menyimpulkan bahwa pidato diplomatik Presiden Prabowo Subianto pada Pertemuan Virtual Pemimpin BRICS tanggal 8 September 2025, mewakili praktik diskursif yang berfungsi untuk membangun identitas dan kekuatan simbolik Indonesia di arena internasional. Dengan menggunakan model Analisis Wacana Kritis Fairclough (2013), studi ini menemukan bahwa pilihan linguistik, struktur retorika, dan strategi diskursif secara kolektif mencerminkan posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kolaborasi dan keadilan internasional. Pidato Prabowo menunjukkan penggunaan kekuatan lunak dan diplomasi politik yang menekankan solidaritas global dan keterbukaan sebagai prinsip utama komunikasi eksternal Indonesia. Melalui kerangka konstruktivis Wendt (1999), analisis ini memperkuat pemahaman bahwa konsepsi kekuatan Indonesia bersifat ideasional dan berakar pada nilai-nilai moral yang diungkapkan melalui komunikasi diplomatik. Tindakan ujaran tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan politik tetapi juga sebagai negosiasi performatif atas peran dan identitas Indonesia dalam sistem global yang terus berkembang. Dengan demikian, konstruksi kekuatan Indonesia tercermin tidak hanya pada kapasitas ekonomi atau geopolitiknya, tetapi juga pada kemampuannya untuk membentuk persepsi, makna, dan tatanan sosial melalui wacana. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu pidato diplomatik dalam forum *virtual BRICS* sehingga masih terbatas dalam merepresentasikan strategi diplomasi Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dalam mengkaji secara mendalam diplomasi Indonesia secara komparatif pada berbagai forum internasional serta mengintegrasikan analisis media serta respon publik global. Secara praktis, temuan penelitian menunjukkan bahasa diplomatik dan strategi komunikasi politik yang memiliki peran penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah tatanan global.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amoako Addae, M. (2021). Party's presidential primaries and the consolidation of democracy in Ghana's 4th Republic. *Cogent Social Sciences*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1978158>
- Armijo, L. E., & Roberts, C. (2014). The emerging powers and global governance : Why the BRICS matter. *Handbook of Emerging Economies*, 503–524. <https://doi.org/10.4324/9780203108765-33>
- Badara, A. (2012). *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Kencana Prenada Media Group. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1978158>

- Beeson, M., & Crawford, C. (2022). Putting the BRI in Perspective: History, Hegemony and Geoeconomics. *Chinese Political Science Review* 2022 8:1, 8(1), 45–62. <https://doi.org/10.1007/S41111-022-00210-Y>
- Dharmaputra, R. (2025). Putin's Russia and Southeast Asia: The Kremlin's Pivot to Asia and the Impact of the Russia-Ukraine War. *Asian Affairs*, 56(4), 967–970. <https://doi.org/10.1080/03068374.2025.2575011>
- Dwyer, T., & Arifon, O. (2019). Recognition and transformation: Beyond media discourses on the BRICS. *Global Media and Communication*, 15(1), 27–47. <https://doi.org/10.1177/1742766518818858>
- Fairclough, N. (1992). Discourse and text: Linguistic and intertextual analysis within discourse analysis. *Discourse & Society*, 3(2), 193–217. <https://doi.org/10.1177/0957926592003002004>
- Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis and critical policy studies. *Critical Policy Studies*, 7(2), 177–197. <https://doi.org/10.1080/19460171.2013.798239>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (2001). Taking stock: The constructivist research program in international relations and comparative politics. *Annual Review of Political Science*, 4(Volume 4, 2001), 391–416. <https://doi.org/10.1146/ANNUREV.POLISCI.4.1.391/CITE/REFWORKS>
- Gronau, J., & Schmidtke, H. (2016). The quest for legitimacy in world politics – international institutions' legitimation strategies. *Review of International Studies*, 42(3), 535–557. <https://doi.org/10.1017/S0260210515000492>
- Heriamsal, K. (2025). Indonesia and the Global South: A Constructivist Approach to Diplomatic Leadership in a Multipolar World Order. *JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI*, 10(1). <https://doi.org/10.70836/JH.V10I1.139>
- Hui, Z., Ghazali, A. H. B. A., & Sha'ri, S. N. (2026). Shaping national identity: Unveiling the power of international idea promotion in enhancing the national image. *International Journal of Human Capital in Urban Management*, 11(1), 155. <https://doi.org/10.22034/IJHCUM.2026.01.10>
- Iqbal, B. A. (2022). BRICS as a Driver of Global Economic Growth and Development. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 14(1), 7–8. <https://doi.org/10.1177/09749101211067096>
- Laksmiana, E. A. (2025). Is Indonesia Sleepwalking into Strategic Alignment with China? *Survival*, 67(1), 61–67. <https://doi.org/10.1080/00396338.2025.2459017>
- McEntee-Atalianis, L. J. (2011). The role of metaphor in shaping the identity and agenda of the United Nations: The imagining of an international community and international threat. *Discourse and Communication*, 5(4), 393–412. <https://doi.org/10.1177/1750481311418099>
- Mielniczuk, F. (2013). BRICS in the Contemporary World: changing identities, converging interests. *Third World Quarterly*, 34(6), 1075–1090. <https://doi.org/10.1080/01436597.2013.802506>
- Mufidah, S., Risna, & Haliq, A. (2025). Critical Discourse Analysis of the 'Indonesia Gelap' Issue on the Meet Nite Live TikTok Account: Dissecting



- Political Narratives in the Social Media Era. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(5), 1114–1125.  
<https://doi.org/10.61445/TOFEDU.V4I5.534>
- O’neill, J. (2001). *Building Better Global Economic BRICs*. <https://www.gs.com>
- Öniş, Z., & Kutlay, M. (2017). The dynamics of emerging middle-power influence in regional and global governance: the paradoxical case of Turkey. *Australian Journal of International Affairs*, 71(2), 164–183.  
<https://doi.org/10.1080/10357718.2016.1183586>
- Putra, F. A. Al, Akbar, M. A., & Sumarman, M. I. A. (2025). Indonesia’s Membership in BRICS: From Economic Growth Opportunities to Geopolitical Challenges. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(2), 63–74.  
<https://doi.org/10.18196/JHI.V13I2.26703>
- Radulescu, I. G., Panait, M., & Voica, C. (2014). BRICS Countries Challenge to the World Economy New Trends. *Procedia Economics and Finance*, 8, 605–613. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00135-X](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00135-X)
- Roberts, K. (2017). Understanding Putin: The politics of identity and geopolitics in Russian foreign policy discourse. *International Journal*, 72(1), 28–55.  
<https://doi.org/10.1177/0020702017692609>
- Romero-Ávila, D. (2025). *Description of BRICS and Indonesia’s Climate Policy*. 37–52. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-81440-2\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-031-81440-2_3)
- Sakinah, Z., Muzaffar, M., & Raihan, M. F. (2025). Indonesia’s Strategic Legal and Economic Response to the US–China Trade War: Implications for Global Value Chains, Foreign Investment and MSMEs. *Trunojoyo Law Review*, 7(2), 287–313. <https://doi.org/10.21107/tlr.v7i2.30350>
- Steffek, J. (2003). The legitimization of international governance: A discourse approach. *European Journal of International Relations*, 9(2), 249–275+340.  
<https://doi.org/10.1177/1354066103009002004>
- Van Dijk, T. A. (2008). Critical discourse analysis and nominalization: problem or pseudo-problem? *Discourse & Society*, 19(6), 821–828.  
<https://doi.org/10.1177/0957926508095897>
- Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics. *Social Theory of International Politics*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511612183>
- Wodak, R., & Meyer, M. (2009). *Methods of Critical Discourse Studies* - Google Books. Sage Publisher.